



## SYSTEM MONITORING PROGRAMME

### PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL

---

*Siaran Pers*

*Periode: Oktober 2010*

*Edisi : 05 Oktober 2010*

#### **JSMP mengadakan pertemuan dengan perwakilan PBB di Timor Leste**

Pada tanggal 05 November 2010 JSMP mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan Yang Mulai Bpk. Finn Rieske Nielsen, selaku wakil khusus PBB di Timor Leste. Pertemuan tersebut diadakan di kantor Finn Rieske pada jam 10:30 WTL. Dalam pertemuan ini utusan dari JSMP terdiri dari 4 orang dan dari kantor perwakilan UNMIT (PBB) selain Finn Rieske sendiri, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh staff teknisnya.

Sama seperti pada pertemuan sebelumnya, JSMP mencoba melakukan pendekatan dengan UNMIT yang mempunyai misi penting untuk semua sektor termasuk pembangunan sektor sistem peradilan di Timor Leste.

Misi PBB di Timor Leste selama ini telah berperan penting untuk mendukung pembangunan di Timor Leste termasuk sektor peradilan melalui para mitra pembangunan di Timor Leste (partner development Timor Leste). Secara khusus UNDP, selama ini telah melakukan investasi yang sangat signifikan untuk sektor peradilan, misalnya dukungan terhadap Pusat Pelatihan Yudisial (*Centro de Formação Judiciário*), dan membuat kontrak kerja dengan para aktor hukum internasional untuk mendukung administrasi pengadilan di Timor Leste, oleh karena itu sangat penting bagi JSMP untuk melakukan pertemuan dan menyampaikan usulan JSMP dan melakukan diskusi atas masalah-masalah yang dianggap relevan dalam sektor peradilan, kata Luis de Oliveira, Direktur JSMP.

Dalam kesempatan ini, selain JSMP menyampaikan keprihatinan JSMP mengenai masalah grasi/pengampunan, keprihatinan JSMP atas kasus Maternus Bere, dan keterlibatan Misi PBB melalui UNMIT atas masalah tersebut, JSMP juga meminta dukungan dari UNMIT untuk terus berkomitmen dalam mendukung semua proses pembangunan sistem hukum di negara ini.

Selain itu pada kesempatan tersebut, JSMP juga menggarisbawahi keprihatinan JSMP mengenai tantangan yang ada dalam sektor peradilan antara lain posisi JSMP mengenai masalah Grasi, Prinsip Negara Hukum, persoalan Pemisahan Kekuasaan, Independensi Institusi Pengadilan dan Pelanggaran HAM/Tindak Pidana Berat di masa lalu, JSMP juga meminta kepada PBB untuk

berperan aktif terlebih untuk memperkuat sistem hukum di Timor Leste. JSMP juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta pada Finn Rieske, yang juga menjabat sebagai Kepala Misi UNDP untuk memfasilitasi JSMP dan kelompok pengacara lainnya untuk mengikuti pelatihan hukum di Pusat Pelatihan Yudisial dengan format yang tidak sama dengan apa yang sedang diterapkan di Pusat Pelatihan tersebut. Proses ini dilakukan untuk membantu meningkatkan pengetahuan teknis dalam aspek terminologi hukum dan interpretasi hukum dan meningkatkan kualitas kerja dan produktifitas publikasi JSMP.

Sebelum menjawab keprihatinan dari JSMP, Finn Rieske Nielsen, memberikan apresiasi atas peranan dan kerja keras JSMP yang selama ini JSMP lakukan untuk membantu pembangunan sistem hukum di Timor Leste. Beliau merasa bangga, bahagia karena selama ini JSMP sebagai sebuah LSM yang suaranya selalu terdengar dan tetap memberikan kontribusinya kepada Negara melalui sektor peradilan. Dengan demikian, dia merasa sangat senang dengan kunjungan yang dipelopori oleh JSMP sendiri.

Sementara itu, ketika menjawab keprihatinan-keprihatinan tersebut di atas, wakil PBB tersebut, menegaskan bahwa pada prinsipnya posisi mereka sama dengan JSMP mengenai beberapa persoalan tersebut di atas. Misi PBB di Timor Leste adalah bagaimana tetap memberikan dukungan atas semua proses tersebut terutama proses pembangunan atas system peradilan, termasuk kejahatan yang terjadi di masa lampau. Menurut informasi yang UNMIT dapatkan bahwa sekarang terdapat sekitar 76 kasus yang sedang ditangguhkan dan semua kasus tersebut terjadi selama krisis tahun 2006 – 2008. Sekali lagi Ia menegaskan bahwa posisi Misi PBB telah secara jelas bahwa mereka tidak setuju jika para aktor kriminal tetap bebas. Sikap PBB sejak awal berkomitmen untuk memberikan keadilan bagi para korban.

Selanjutnya, dia menambahkan bahwa pada bulan sebelumnya utusan PBB di Timor Leste, melalui yang mulia Ibu Ameraah Haq Kepala Misi UNMIT, telah menyampaikan laporan pada Dewan Keamanan PBB mengenai posisi UNMIT atas masalah grasi/pengampunan dan pengurangan hukuman dari Presiden Republik.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak. Finn Rieske merasa sangat senang dan memberi dorongan pada JSMP guna melanjutkan pertemuan secara regular setiap tiga bulan sekali untuk melihat kembali semua masalah yang telah didiskusikan tersebut, termasuk untuk melihat kemajuan dari usulan JSMP untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Yudisial.

Menurut rencana, JSMP akan melakukan pendekatan dengan Presiden Parlemen Nasional untuk membahas isu-isu di seputar sektor peradilan dan meminta semua orang untuk melakukan upaya kolektif untuk melakukan investasi atau memperkuat pada sistem hukum yang kokoh sehingga dapat menjadi landasann atas pemerintahan yang baik di Timor Leste.

Untuk mendapatkan informasi selanjutnya hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur eksekutif JSMP

Alamat Email: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: +670 3323883 ka +670 7295795